



# DEWAN KETAHANAN NASIONAL RI

## SEKRETARIAT JENDERAL

Jl. Medan Merdeka Barat No. 15 Jakarta Pusat 10110 - <http://www.wantannas.go.id>  
Telepon (021) 3451066, Faksimile (021) 3451066

### INSTRUKSI DEPUTI SISTEM NASIONAL NOMOR 1 TAHUN 2022

#### TENTANG

#### AKSI REFORMASI BIROKRASI DEPUTI SISTEM NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2022 DAN TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI TAHUN 2021

#### DEPUTI SISTEM NASIONAL,

Agar kinerja Tim Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2022 bisa lebih terpantau dan terukur, dengan ini menginstruksikan:

Kepada : 1. Para Pembantu Deputi dan Analis Kebijakan di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional; dan  
2. Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.

Untuk :

**PERTAMA** : Para Pembantu Deputi dan Analis Kebijakan wajib melakukan monitoring, memberi dukungan, dan memfasilitasi Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Deputi Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dalam pelaksanaan Aksi Reformasi Birokrasi Tahun 2022 pada 2 (dua) Komponen Pengungkit yang meliputi Aspek Pemenuhan dan Aspek Reform, sebagaimana tercantum dalam Lampiran I serta tindak lanjut hasil evaluasi tahun 2021 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Instruksi Deputi Sistem Nasional ini.

**KEDUA** : Para Koordinator Kelompok Program beserta Anggota Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Deputi Sistem Nasional senantiasa berkoordinasi dengan Ketua Kelompok Program terkait dari Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional dalam melaksanakan aksi reformasi birokrasi di bidang masing – masing.

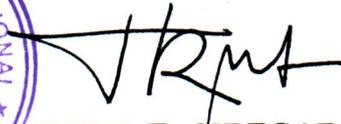
KETIGA . . .

- KETIGA** : Para Koordinator Kelompok Program:
1. Memberikan laporan pelaksanaan aksi reformasi birokrasi secara berkala kepada Ketua melalui Wakil Ketua/Koordinator masing-masing program;
  2. Mendukung Asesor dalam menyusun lembar kerja evaluasi pelaksanaan aksi reformasi birokrasi kemudian diunggah ke Aplikasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi setelah mendapat persetujuan dari Ketua; dan
  3. Membuat laporan tahunan pelaksanaan aksi reformasi birokrasi tahun 2022 sesuai program masing – masing sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan disampaikan kepada Sekretaris pada akhir bulan November 2022.
- KEEMPAT** : Masa kerja aksi Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2022 sebagaimana dimaksud diktum KESATU terhitung sejak tanggal dikeluarkannya Instruksi Deputy Sistem Nasional ini sampai dengan 31 Desember 2022.
- KELIMA** Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan Instruksi Deputy Sistem Nasional ini, dibebankan pada anggaran Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional.
- KEENAM** : Melaksanakan Instruksi Deputy Sistem Nasional ini dengan sungguh-sungguh dan penuh tanggung jawab.
- KETUJUH** : Instruksi Deputy Sistem Nasional ini mulai berlaku pada tanggal dikeluarkan.

Dikeluarkan di Jakarta  
Pada tanggal 13 Juli 2022

DEPUTI SISTEM NASIONAL  
SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



  
SYACHRIYAL E. SIREGAR

LAMPIRAN 1  
 INSTRUKSI DEPUTI SISTEM NASIONAL  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG AKSI REFORMASI BIROKRASI DEPUTI SISTEM  
 NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN  
 NASIONAL TAHUN 2022 DAN TINDAK LANJUT HASIL  
 EVALUASI TAHUN 2021

AKSI REFORMASI BIROKRASI  
 DI LINGKUNGAN DEPUTI SISTEM NASIONAL  
 SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2022

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET	KET	
1	2	3	4	5	6	
<b>Aspek Pemuenuhan</b>						
1.	Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk	Ketua Program Manajemen Perubahan	Pok A	Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah dibentuk	Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Tim Pengarah dan Tim Pelaksana Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di lingkungan Kedeputian Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
2.	Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja			Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melaksanakan tugas sesuai rencana kerja Tim Reformasi Birokrasi	a. Diterbitkan Instruksi Deputy Sistem Nasional tentang Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2022	B03, B06, B09, B12

b. Laporan . . .

1	2	3	4	5	6
				<p>b. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p>	<p>B03, B06, B09, B12</p>
3.	<p>Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti</p>		<p>Tim Reformasi Birokrasi/ Penanggung jawab Reformasi Birokrasi telah melakukan monitoring dan evaluasi rencana kerja, dan hasil evaluasi telah ditindaklanjuti</p>	<p>a. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional                      b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional                      c. Laporan Tindak Lanjut atas Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p>	<p>B03</p>
4.	<p>Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan</p>		<p>Road Map/Rencana Kerja Reformasi Unit Kerja telah disusun dan diformalkan</p>	<p>Terusunnya dan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Road map Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2020 -- 2024</p>	<p>B03</p>
5.	<p>Telah terdapat sosialisasi/ internalisasi Road Map/ Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi</p>		<p>Telah terdapat sosialisasi/ internalisasi Road Map/Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja kepada anggota organisasi</p>	<p>Dilaksanakannya sosialisasi/ internalisasi Road Map Reformasi Birokrasi kepada seluruh pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p>	<p>B03, B06, B09, B12</p>

7. Pelaksanaan . . .

1	2	3	4	5	6
6.	Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan <i>Road Map</i>		Rencana Kerja Reformasi Birokrasi unit kerja selaras dengan <i>Road Map</i>	a. Tersusunnya dan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang <i>Road map</i> Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2020 – 2024 b. Diterbitkan Instruksi Deputy Sistem Nasional tentang Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2022 c. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12
7.	Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku		Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	a. Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pembentukan Tim Asesor PMPRB Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Pelaksanaan PMPRB dilakukan oleh Asesor sesuai dengan ketentuan yang berlaku	B03, B06, B09, B12
8.	Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB		Para asesor mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja sebelum menetapkan nilai PMPRB instansi	Telah mencapai konsensus atas pengisian kertas kerja PMPRB di lingkungan Kedeputusan Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B06

1	2	3	4	5	6
9.	Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan		Rencana aksi tindak lanjut (RATL) telah dikomunikasikan dan dilaksanakan	Disosialisasikan dan dilaksanakan Instruksi Deputy Sistem Nasional tentang Aksi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tahun 2022	B03, B06, B09, B12
10.	Penanggung jawab RB internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja		Penanggung jawab reformasi birokrasi internal unit kerja telah melakukan pemantauan dan evaluasi pelaksanaan rencana kerja	<p>a. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p> <p>b. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p> <p>c. Laporan Tindak Lanjut atas Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p>	B03, B06, B09, B12
11.	Terdapat keterlibatan pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi		Terdapat keterlibatan pimpinan tertinggi/pimpinan unit kerja secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan reformasi birokrasi	Seluruh jajaran pimpinan tertinggi terlibat secara aktif dan berkelanjutan dalam pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12
12.	Terdapat upaya untuk menggerakkan unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>		Terdapat upaya untuk menggerakkan organisasi/unit kerja dalam melakukan perubahan melalui pembentukan <i>agent of change</i> ataupun <i>role model</i>	a. Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B06, B12

b. Pelatihan . . .

1	2	3	4	5	6	
				b. Pelatihan <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional		
13.	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap kebijakan yang tidak harmonis/ sinkron/ bersifat menghambat yang akan direvisi/ dihapus	Ketua Program Deregulasi Kebijakan	Pok B	Telah dilakukan identifikasi, analisis, dan pemetaan terhadap peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis/ sinkron/ bersifat menghambat yang akan direvisi/ dihapus	Laporan evaluasi penguatan perundang-undangan di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B06, B12
14.	Telah dilakukan revisi kebijakan yang tidak harmonis/ tidak sinkron/ bersifat menghambat			Telah dilakukan revisi peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis / tidak sinkron/ bersifat menghambat	Disusunnya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Program Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
15.	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Ketua Program Penataan Penguatan Organisasi	Pok C	Telah dilakukan evaluasi yang bertujuan untuk menilai ketepatan fungsi dan ketepatan ukuran organisasi	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
16.	Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi			Telah dilakukan evaluasi yang mengukur jenjang organisasi	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
17.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi			Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan duplikasi fungsi	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
18.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan			Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan adanya pejabat yang melapor kepada lebih dari seorang atasan	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
19.	Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit kerja di atasnya			Telah dilakukan evaluasi kesesuaian tugas dan fungsi dengan sasaran kinerja unit organisasi di atasnya	Laporan Evaluasi Kelembagaan Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12

20. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
20.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis rentang kendali terhadap struktur yang langsung berada di bawahnya	Laporan Evaluasi Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
21.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/ unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kesesuaian struktur organisasi/unit kerja dengan kinerja yang akan dihasilkan	Laporan Evaluasi Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
22.	Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan		Telah dilakukan evaluasi atas kesesuaian struktur organisasi dengan mandat /kewenangan lembaga	Laporan Evaluasi Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
23.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan unit kerja lain		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemungkinan tumpang tindih fungsi dengan instansi lain	Laporan Evaluasi Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
24.	Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis		Telah dilakukan evaluasi yang menganalisis kemampuan struktur organisasi untuk adaptif terhadap perubahan lingkungan strategis	Laporan Evaluasi Pemerintah Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
25.	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi		Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan mengajukan perubahan organisasi	Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
26.	Hasil evaluasi telah ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi		Hasil evaluasi untuk ditindaklanjuti dengan penyederhanaan birokrasi	Pelantikan Pejabat Fungsional di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B09, B12
27.	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis	Ketua Program Penataan Laksana	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan pedoman penyusunan Peta Proses Bisnis Kementerian/ lembaga/ pemerintah daerah	Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

28. Telah ...

1	2	3	4	5	6
28.	Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi		Telah tersedia peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</li> <li>b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</li> </ul>	B03
29.	Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana organisasi		Telah disusun peta proses bisnis yang sesuai dengan dokumen rencana strategis dan rencana kerja organisasi	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</li> <li>b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</li> <li>c. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang IKU Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</li> </ul>	B03
30.	Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang		Telah memiliki peta proses bisnis yang sesuai dengan tugas dan fungsi dan selaras dengan Kinerja Organisasi secara berjenjang	<ul style="list-style-type: none"> <li>a. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</li> <li>b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Renstra Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</li> </ul>	B03

1	2	3	4	5	6
				c. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang IKU Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	
31.	Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)		Peta proses bisnis sudah dijabarkan ke dalam prosedur operasional tetap (SOP)	Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
32.	Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP		Telah dilakukan penjabaran peta lintas fungsi (peta level n) ke dalam SOP	Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
33.	Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan		Prosedur operasional tetap (SOP) telah diterapkan	a. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Penataan Tata Laksana ( <i>business process</i> ) di lingkungan Setjen Wantannas c. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B12
34.	Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi		Peta proses bisnis dan Prosedur operasional telah dievaluasi dan disesuaikan dengan perkembangan tuntutan efisiensi, dan efektivitas birokrasi	a. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal	B03, B06, B12

Dewan . . .

1	2	3	4	5	6
35.	Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi		Telah dilakukan evaluasi terhadap peta proses bisnis yang sesuai dengan efektivitas hubungan kerja antar unit organisasi untuk menghasilkan kinerja sesuai dengan tujuan pendirian organisasi	Dewan Ketahanan Nasional a. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Laporan Monitoring dan evaluasi Penerapan SOP di Lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03, B06, B12
36.	Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik		Adanya kebijakan pimpinan tentang keterbukaan informasi publik	Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan tentang Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
37.	Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik		Melakukan monitoring dan evaluasi pelaksanaan kebijakan keterbukaan informasi publik	Laporan Layanan Informasi Publik	B12
38.	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan sesuai kebutuhan unit kerja	Ketua Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Perhitungan kebutuhan pegawai telah dilakukan	a. Peraturan Sekretariat tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
39.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan		Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah dilakukan	Peraturan Sekretariat tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

1	2	3	4	5	6
40.	Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama		Analisis jabatan dan analisis beban kerja telah sesuai kebutuhan unit kerja dan selaras dengan kinerja utama	Peraturan Sekretariat tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
41.	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi		Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi	Telah diidentifikasi kebutuhan pengembangan kompetensi kepada seluruh pegawai	B03
42.	Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi		Telah dilakukan pengembangan pegawai berbasis kompetensi sesuai dengan rencana dan kebutuhan pengembangan kompetensi	Laporan peningkatan kompetensi SDM	B12
43.	Penerapan Penetapan kinerja individu		Penerapan Penetapan kinerja individu	Penerapan penetapan kinerja individu telah dilakukan terhadap seluruh pegawai	B12
44.	Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi		Terdapat penilaian kinerja individu yang terkait dengan kinerja organisasi	Seluruh penilaian kinerja individu terkait dengan kinerja organisasi	B12
45.	Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya		Ukuran kinerja individu telah memiliki kesesuaian dengan indikator kinerja individu level diatasnya	Seluruh ukuran kinerja individu sesuai dengan indikator kinerja individu level diatasnya	B12
46.	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik		Pengukuran kinerja individu dilakukan secara periodik	Pengukuran kinerja individu dilakukan secara tahunan	B12
47.	Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu		Telah dilakukan monitoring dan evaluasi atas pencapaian kinerja individu	Telah dilakukan monev atas pencapaian kinerja individu secara tahunan	B12
48.	Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/ pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya		Hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/ pemberian penghargaan dan sanksi lainnya	Seluruh hasil penilaian kinerja individu telah dijadikan dasar untuk pengembangan karir individu/ pemberian <i>reward and punishment</i> lainnya	B12

1	2	3	4	5	6
49.	Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan		Aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi telah ditetapkan	Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
50.	Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku		Adanya monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan aturan disiplin/kode etik/kode perilaku instansi	Laporan monitoring dan evaluasi atas pelaksanaan Peraturan Setjen Wantannas tentang Kode Etik Pegawai Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
51.	Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)		Unit kerja telah mengimplementasikan Standar Kompetensi Jabatan (SKJ)	Peraturan Sekretariat tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
52.	Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ		Unit kerja telah melaksanakan evaluasi jabatan berdasarkan SKJ	Peraturan Sekretariat tentang Peta Jabatan dan Kelas Jabatan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
53.	Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai		Sistem informasi kepegawaian dapat diakses oleh pegawai	Pegawai dapat mengakses sistem informasi kepegawaian	B03
54.	Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	Ketua Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	Pimpinan/pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Renstra	a. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional tahun 2020 – 2024 b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penetapan Tim Renstra	B03
55.	Pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja		Pimpinan/pimpinan unit kerja terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	Seluruh pimpinan terlibat secara langsung pada saat penyusunan Penetapan Kinerja	B03

56. Pimpinan . . .

1	2	3	4	5	6
56.	Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		Pimpinan/pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala	Seluruh pimpinan memantau pencapaian kinerja secara berkala	B03
57.	Pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah		Pimpinan/pimpinan unit kerja telah memahami kinerja yang harus dicapai dalam jangka menengah	a. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Rencana Strategis Dewan Ketahanan Nasional tahun 2020 – 2024 b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penetapan Tim Renstra	B03
58.	Pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjajikan di setiap tahun		Pimpinan/pimpinan unit kerja memahami kinerja yang diperjajikan di setiap tahun	Pimpinan memahami kinerja yang harus dicapai setiap tahun	B03
59.	Pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala		Pimpinan/pimpinan unit kerja memantau pencapaian kinerja secara berkala	Pimpinan menindaklanjuti hasil pemantauan rencana aksi secara berkala	B03
60.	Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja		Terdapat upaya peningkatan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	Seluruh unit organisasi berupaya meningkatkan kapasitas SDM yang menangani akuntabilitas kinerja	B03
61.	Penutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala		Penutakhiran data kinerja dilakukan secara berkala	Penutakhiran data kinerja dilakukan secara bulanan	B03, B06, B09, B12
62.	Telah dilakukan <i>public campaign</i>	Ketua Program Pok G	Telah dilakukan <i>public campaign</i>	<i>Public campaign</i> telah dilakukan secara berkala	B03, B06, B09, B12
63.	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	Penguatan Pengawasan	Penanganan gratifikasi telah diimplementasikan	UPG melaporkan secara berkala tentang praktek gratifikasi	B03, B06, B09, B12
64.	Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi		Telah dilakukan evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	Terdapat evaluasi atas kebijakan penanganan gratifikasi	B03, B06, B09, B12
65.	Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti		Hasil evaluasi atas penanganan gratifikasi telah ditindaklanjuti	Terdapat laporan tindak lanjut	B03, B06, B09, B12

66. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
66.	Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian		Telah mengidentifikasi lingkungan pengendalian	a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang pedoman Teknis Penyelenggaraan Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional. b. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Satuan Tugas Penyelenggara Sistem Pengendalian Intern Pemerintah di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
67.	Telah dilakukan penilaian risiko unit kerja		Telah dilakukan penilaian risiko atas organisasi/unit kerja	Seluruh organisasi telah melakukan penilaian risiko	B03
68.	Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi		Telah dilakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	Seluruh organisasi telah melakukan kegiatan pengendalian untuk meminimalisir risiko yang telah diidentifikasi	B03
69.	Sistem Pengendalian Internal (SPI) telah diinformasikan kepada seluruh pihak terkait		SPI telah diinformasikan kepada seluruh pihak terkait	SPI telah diinformasikan dan dikomunikasikan kepada seluruh pihak terkait	B03, B06, B09, B12
70.	Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern		Telah dilakukan pemantauan pengendalian intern	Sistem pengendalian intern dimonitoring dan evaluasi secara berkala	B12
71.	Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI		Unit kerja telah melakukan evaluasi atas Penerapan SPI	Seluruh unit kerja telah melakukan monitoring dan evaluasi secara berkala serta memberikan perbaikan dalam penerapan SPI	B12
72.	Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		Hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Seluruh hasil penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	B12

73. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
73.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat	Penanganan pengaduan masyarakat dimonitoring dan evaluasi secara berkala	B12
74.	Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti		Hasil evaluasi atas penanganan pengaduan masyarakat telah ditindaklanjuti	Terdapat laporan hasil evaluasi atas tindak lanjut penanganan pengaduan masyarakat	B12
75.	<i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan		<i>Whistle Blowing System</i> telah disosialisasikan	<i>Whistle blowing system</i> disosialisasikan ke seluruh organisasi	B03, B06, B09, B12
76.	Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan		Penanganan Benturan Kepentingan telah disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	Penanganan Benturan Kepentingan disosialisasikan ke seluruh unit organisasi	B03, B06, B09, B12
77.	Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan		Penanganan Benturan Kepentingan telah diimplementasikan	Laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
78.	Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan		Telah dilakukan evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan	Laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
79.	Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti		Hasil evaluasi atas Penanganan Benturan Kepentingan telah ditindaklanjuti	Laporan pelaksanaan, monitoring, dan tindak lanjut penanganan benturan kepentingan di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B12
80.	Telah dilakukan penancangan Pembangunan zona integritas level unit kerja		Telah dilakukan penancangan zona integritas	Keputusan Sesjen Wantannas tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

81. Telah ...

1	2	3	4	5	6
81. Telah dilakukan pembangunan zona integritas			Telah dilakukan pembangunan zona integritas	a. Keputusan Sesjen Wantannas tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Instruksi Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Rencana Aksi ZI Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
82. Telah dilakukan evaluasi atas pembangunan zona integritas			Telah dilakukan evaluasi atas zona integritas yang telah ditentukan	a. Keputusan Sesjen Wantannas tentang Pembentukan TPI ZI b. Keputusan Sesjen Wantannas tentang Penetapan Calon Unit Kerja Berpredikat Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Laporan Monitoring dan Evaluasi atas Zona Integritas di Lingkungan Setjen Wantannas	B03
83. Terdapat kebijakan standar pelayanan		Ketua Pok H Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Terdapat kebijakan standar pelayanan	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang standar pelayanan unit kerja di lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
84.	Standar pelayanan telah dimaklumkan		Standar pelayanan telah dimaklumkan	Standar pelayanan telah dimaklumkan pada seluruh jenis pelayanan dan dipublikasikan minimal di <i>website</i>	B03

85. Dilakukan . . .

1	2	3	4	5	6
85.	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan		Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan	Dilakukan reviu dan perbaikan atas standar pelayanan dan dilakukan dengan melibatkan <i>stakeholders</i> (antara lain : tokoh masyarakat, akademisi, dunia usaha, dan lembaga swadaya masyarakat), serta memanfaatkan masukan hasil SKM dan pengaduan masyarakat	B12
86.	Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima		Telah dilakukan berbagai upaya peningkatan kemampuan dan/atau kompetensi tentang penerapan budaya pelayanan prima	Telah dilakukan pelatihan/sosialisasi pelayanan prima, sehingga seluruh petugas/pelaksana layanan memiliki kompetensi sesuai kebutuhan jenis layanan	B03, B06, B09, B12
87.	Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media		Informasi tentang pelayanan mudah diakses melalui berbagai media	Seluruh Informasi tentang pelayanan dapat diakses secara <i>online</i> ( <i>website</i> /media sosial) dan terhubung dengan sistem informasi pelayanan publik nasional	B03, B06, B09, B12
88.	Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan		Telah terdapat sistem pemberian penghargaan dan sanksi bagi petugas pemberi pelayanan	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Sistem Penghargaan dan Sanksi ( <i>Reward and Punishment</i> ) Bagi Pelaksana Layanan dan Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03

89. Telah . . .

1	2	3	4	5	6
89.	Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar		Telah terdapat sistem pemberian kompensasi kepada penerima layanan bila layanan tidak sesuai standar	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional Tentang Sistem Penghargaan dan Sanksi ( <i>Reward and Punishment</i> ) Bagi Pelaksana Layanan dan Kompensasi Bagi Penerima Layanan di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
90.	Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi		Telah terdapat sarana layanan terpadu/terintegrasi	Seluruh pelayanan sudah dilakukan secara terpadu dan sarana prasarana layanan memenuhi standar sarpras	B03, B06, B09, B12
91.	Telah terdapat inovasi pelayanan		Terdapat inovasi pelayanan	Inovasi pelayanan telah mendapatkan pengakuan secara internasional dan/atau nasional dan telah direplikasi oleh instansi lain	B03, B06, B09, B12
92.	Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan		Terdapat media pengaduan dan konsultasi pelayanan	Terdapat media konsultasi dan pengaduan secara <i>offline</i> dan <i>online</i> , tersedia petugas khusus yang menangani, dan terintegrasi dengan SP4N-LAPORI	B03, B06, B09, B12
93.	Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan		Terdapat unit yang mengelola pengaduan dan konsultasi pelayanan	Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang tim koordinasi pengelolaan layanan aspirasi dan pengaduan <i>online</i> rakyat (LAPOR) sistem pengelolaan pengaduan pelayanan publik nasional (SP4N) Setjen Wantannas	B03
94.	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan		Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	Telah dilakukan tindak lanjut atas seluruh pengaduan pelayanan untuk perbaikan kualitas pelayanan	B12

95. Telah ...

1	2	3	4	5	6	
95.	Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/masukan dan konsultasi		Telah dilakukan evaluasi atas penanganan keluhan/ masukan dan konsultasi	Laporan evaluasi penanganan keluhan/masukan dan konsultasi secara berkala	B12	
96.	Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan		Dilakukan survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan	Survei kepuasan masyarakat terhadap pelayanan dilakukan minimal 1 kali dalam setahun	B12	
97.	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka		Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara terbuka	Hasil survei kepuasan masyarakat dapat diakses secara <i>online (website, media sosial, dll)</i> dan <i>offline</i>	B12	
98.	Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat		Dilakukan tindak lanjut atas hasil survei kepuasan masyarakat	Laporan Tindak Lanjut IKM	B12	
99.	Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan		Telah menerapkan teknologi informasi dalam memberikan pelayanan	Terdapat pelayanan yang menggunakan teknologi informasi pada seluruh proses pemberian layanan	B03, B06, B09, B12	
100.	Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus		Telah dilakukan perbaikan secara terus menerus	Laporan Kegiatan Pengelolaan Siso <i>Upgrade</i> Pemeliharaan dan <i>Update</i> Sistem	B12	
<b>Aspek Reform</b>						
1.	Agan perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi	Ketua Program Manajemen Perubahan	Pok A	Agan perubahan telah membuat perubahan yang konkret di Instansi	a. Diterbitkannya Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Pelatihan <i>agent of change</i> Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Keputusan Sesjen Wantannas tentang Pembentukan TPI ZI	B03, B06, B09, B12

d. Tersusunnya...

1	2	3	4	5	6
				<p>d. Tersusunnya laporan <i>agent of change</i> di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p>	<p>B06, B12</p>
<p>2.</p>	<p>Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen</p>		<p>Perubahan yang dibuat Agen Perubahan telah terintegrasi dalam sistem manajemen</p>	<p>Tersusunnya laporan <i>agent of change</i> di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p>	<p>B06, B12</p>
<p>3.</p>	<p>Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan</p>		<p>Pimpinan memiliki komitmen terhadap pelaksanaan reformasi birokrasi, dengan adanya target capaian reformasi yang jelas di dokumen perencanaan instansinya</p>	<p>a. Tersusunnya dan diterbitkannya Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang <i>Road map</i> Reformasi Birokrasi Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional 2020 – 2024                      b. Instruksi Deputy Sistem Nasional tentang Rencana Aksi ZI di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional                      c. Laporan Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional                      d. Laporan Monitoring dan Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p>	<p>B03, B06, B09, B12</p>

1	2	3	4	5	6
				<p>e. Laporan Tindak Lanjut atas Monitoring dan Evaluasi Reformasi Birokrasi di lingkungan Deputy Sistem Nasional Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p>	B03
4.	<p>Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari</p>		<p>Instansi membangun budaya kerja positif dan menerapkan nilai-nilai organisasi dalam pelaksanaan tugas sehari-hari</p>	<p>Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Penunjukkan <i>Role Model</i> Pengembangan Budaya Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p>	B03
5.	<p>Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya</p>	<p>Ketua Program Deregulasi Kebijakan</p>	<p>Pok B Kebijakan yang diterbitkan memiliki peta keterkaitan dengan kebijakan lainnya</p>	<p>Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pembentukan Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p>	B03
6.	<p>Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama unit kerja</p>		<p>Kebijakan terkait pelayanan dan atau perizinan yang diterbitkan memuat unsur kemudahan dan efisiensi pelayanan utama instansi</p>	<p>a. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Pedoman Penanganan Pengaduan Masyarakat di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Standar Prosedur Layanan Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional c. Keputusan Sekretaris Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional</p>	B03

7. Penyesuaian . . .

1	2	3	4	5	6	
7.	Penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan.	Ketua Program Penataan Penguatan Organisasi	Pok C dan Penguatan Organisasi	Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah telah dilakukan penyesuaian organisasi dalam rangka mewujudkan organisasi yang efektif, efisien dan tepat ukuran sesuai dengan proses bisnis, dengan mempertimbangkan kinerja utama yang dihasilkan	a. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional b. Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
8.	Telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	Ketua Program Penataan Laksana	Pok D Tata	Peta Proses Bisnis Mempengaruhi Penyederhanaan Jabatan dilakukan dengan melihat apakah telah disusun peta proses bisnis dengan adanya penyederhanaan jabatan	Peraturan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional tentang Peta Proses Bisnis di Lingkungan Sekretariat Jenderal Dewan Ketahanan Nasional	B03
9.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien			Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien	Aplikasi pelayanan publik Wantannas telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)	B03, B06, B09, B12
10.	Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien			Implementasi SPBE telah terintegrasi dan mampu mendorong pelaksanaan pelayanan internal organisasi yang lebih cepat dan efisien	Aplikasi pelayanan publik Wantannas telah mampu mendorong pelaksanaan pelayanan publik yang lebih cepat dan efisien, namun belum terintegrasi (parsial)	B03, B06, B09, B12
11.	Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal			Transformasi digital pada bidang proses bisnis utama telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	Penggunaan berbagai aplikasi digital di tiap - tiap unit kerja telah mampu memberikan kemudahan, kecepatan, dan nilai manfaat sehingga memberikan dampak positif untuk mencapai tujuan organisasi secara optimal	B03, B06, B09, B12

12. Transformasi . . .

1	2	3	4	5	6
12.	Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		Transformasi digital pada bidang administrasi pemerintahan telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	Aplikasi internal khususnya dibidang administrasi pemerintahan telah mampu membantu dan mendorong tata kelola organisasi menjadi lebih mudah dan cepat serta menjaga prinsip - prinsip akuntabilitas, transparansi, efektif dan efisien. Aplikasi internal tersebut adalah aplikasi SANRICE, Aplikasi SIMDOKJI (Sistem Informasi Dokumen Kajian), SIIDIK, SRIKANDI, E-KINERJA ASN, Kesekretariatan Online	B03, B06, B09, B12
13.	Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi unit kerja secara optimal		Transformasi digital pada bidang pelayanan publik telah mampu memberikan nilai manfaat bagi organisasi secara optimal	Portal Setjen Wantannas secara berkala telah mempublikasikan kepada publik tentang program kerja, kegiatan, dan capaian yang perlu diketahui oleh publik untuk menjaga transparansi dan akuntabilitas. Selanjutnya, simpul informasi Setjen Wantannas lainnya khususnya di media sosial ( <i>Instagram, youtube, facebook, website</i> ) cukup responsif dalam menyampaikan informasi yang aktual kepada publik	B03, B06, B09, B12
14.	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil ( <i>outcome</i> ) sesuai pada levelnya	Ketua Program Penataan Sistem Manajemen SDM	Ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil ( <i>outcome</i> ) sesuai pada levelnya	Seluruh ukuran kinerja individu telah berorientasi hasil ( <i>outcome</i> ) sesuai pada levelnya	B03, B06, B09, B12
15.	Hasil <i>assessment</i> telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	Aparatur	Diukur dengan melihat apakah hasil <i>assessment</i> telah dijadikan pertimbangan untuk mutasi dan pengembangan karir pegawai	Seluruh hasil <i>assessment</i> dijadikan dasar mutasi internal dan pengembangan kompetensi pegawai	B03, B06, B09, B12

16. Penurunan . . .

1	2	3	4	5	6
16.	Penurunan pelanggaran disiplin pegawai		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terjadi penurunan pelanggaran disiplin pegawai	Persentase penurunan pelanggaran disiplin pegawai diperoleh dari jumlah pelanggaran tahun sebelumnya dikurangi jumlah pelanggaran tahun ini kemudian dibagi dengan jumlah pelanggaran tahun sebelumnya	B03, B06, B09, B12
17.	Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien	Ketua Program Penguatan Akuntabilitas Kinerja	<p>Penggunaan anggaran yang efektif dan efisien</p> <p>Perhitungan jumlah program/kegiatan yang ada</p> <p>Perhitungan jumlah program/kegiatan yang mendukung tercapainya kinerja utama organisasi</p> <p>Persentase sasaran dengan capaian 100% atau lebih</p> <p>Persentase Anggaran yang berhasil di-<i>refocussing</i> untuk mendukung tercapainya kinerja utama organisasi</p>	<p>Tersusunnya dokumen rencana kerja tahun 2022</p> <p>Tersusunnya dokumen rencana kerja tahun 2022</p> <p>Tersusunnya dokumen rencana kerja tahun 2022</p> <p>Tersusunnya dokumen LAKIP tahun 2021</p> <p>Tersusunnya dokumen LAKIP tahun 2021</p>	<p>B03, B06, B09, B12</p>
18.	Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan untuk menciptakan efektifitas dan efisiensi anggaran	Aplikasi yang terintegrasi telah dimanfaatkan sebagai alat monitoring kinerja sehingga menghasilkan efektifitas dan efisiensi penganggaran	B03, B06, B09, B12
19.	Hasil Capaian/Monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> oleh unit kerja		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah hasil capaian/monitoring Perjanjian Kinerja telah dijadikan dasar sebagai pemberian <i>reward and punishment</i> bagi organisasi	Seluruh capaian kinerja (Perjanjian Kinerja) merupakan unsur dalam pemberian <i>reward and punishment</i>	B03, B06, B09, B12

20. Terdapat . . .

1	2	3	4	5	6
20.	Terdapat Peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat kondisi apakah terdapat peta strategis yang mengacu pada kinerja utama (Kerangka Logis Kinerja) organisasi dan dijadikan dalam penentuan kinerja seluruh pegawai	Peta strategis (Kerangka Logis) ada dan mengacu pada kinerja utama organisasi dan digunakan dalam penjabaran kinerja seluruh pegawai	B03, B06, B09, B12
21.	Persentase penyampaian LHKPN	Ketua Program Penguatan Pengawasan Pok G	Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Jumlah yang harus melaporakan Jumlah yang sudah melaporakan	Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporakan harta kekayaan Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN) Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Pejabat Negara (LHKPN)	B03, B06, B09, B12 B03, B06, B09, B12
22.	Persentase penyampaian LHKASN		Jumlah yang sudah melaporakan Jumlah yang harus melaporakan	Kewajiban Penyelenggara Negara untuk melaporakan harta kekayaan Persentase penyampaian Laporan Harta Kekayaan Aparatur Sipil Negara (LHKASN)	B03, B06, B09, B12 B03, B06, B09, B12
23.	Persentase Penanganan Pengaduan Masyarakat		Pengukuran indikator ini dilakukan dengan melihat persentase penanganan pengaduan masyarakat	Realisasi penanganan pengaduan masyarakat yang harus diselesaikan	B03, B06, B09, B12
24.	Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada Kesesuaian Persyaratan, Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Kecepatan Waktu Penyelesaian, Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis, Kualitas Produk Spesifikasi	Ketua Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik Pok H	Upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik pada Kesesuaian Persyaratan, Kemudahan Sistem, Mekanisme, dan Prosedur, Kecepatan Waktu Penyelesaian, Kejelasan Biaya/Tarif, Gratis, Kualitas Produk Spesifikasi Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana/Web, Perilaku Pelaksana/Web,	Presentase upaya dan/atau inovasi telah mendorong perbaikan pelayanan publik	B03, B06, B09, B12

Jenis . . .

1	2	3	4	5	6
	Jenis Pelayanan, Kompetensi Pelaksana/Web, Perilaku Pelaksana/Web, Kualitas Sarana dan prasarana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		Kualitas Sarana dan prasarana, Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan		
25.	Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah Waktu lebih cepat, Alur lebih pendek/singkat, Terintegrasi dengan aplikasi		Upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah Waktu lebih cepat, Alur lebih pendek/singkat, Terintegrasi dengan aplikasi	Presentase upaya dan/atau inovasi pada perijinan/pelayanan telah dipermudah	B03, B06, B09, B12
26.	Penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab		penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsif dan bertanggung jawab	Jumlah penanganan pengaduan pelayanan dan konsultasi dilakukan melalui berbagai kanal/media secara responsive dan bertanggung jawab	B03, B06, B09, B12



DEPUTI SISTEM NASIONAL  
 SEKRETARIAT JENDERAL  
 DEWAN KETAHANAN NASIONAL,  
 SYACHRIVAL E. SIREGAR

LAMPIRAN II  
 INSTRUKSI DEPUTI SISTEM NASIONAL  
 NOMOR 1 TAHUN 2022  
 TENTANG AKSI REFORMASI BIROKRASI DEPUTI SISTEM  
 NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN  
 NASIONAL TAHUN 2022 DAN TINDAK LANJUT HASIL  
 EVALUASI TAHUN 2021

**TINDAK LANJUT HASIL EVALUASI PELAKSANAAN REFORMASI BIROKRASI  
 DEPUTI SISTEM NASIONAL SEKRETARIAT JENDERAL DEWAN KETAHANAN NASIONAL TAHUN 2021**

NO.	AKSI	PENANGGUNG JAWAB	INDIKATOR KEBERHASILAN	TARGET	KET
1	2	3	4	5	6
1.	Telah memiliki media publikasi reformasi birokrasi pada <i>website</i> Setjen Wantannas <a href="https://ortaladkn.go.id/sirebo">https://ortaladkn.go.id/sirebo</a>	Ketua Program Manajemen Perubahan	Memaksimalkan pemanfaatan media informasi yang telah dibangun dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik	Memaksimalkan pemanfaatan media informasi yang telah dibangun dalam rangka meningkatkan keterbukaan informasi publik, serta menyebarluaskan perubahan - perubahan baik di lingkungan Setjen Wantannas sehingga tercipta persepsi positif dari <i>stakeholder</i> dan masyarakat	B03, B06, B09, B12
2.	Agen perubahan telah berperan dalam meningkatkan pelaksanaan reformasi birokrasi		Meningkatkan peran seluruh agen perubahan di setiap unit kerja untuk tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya, namun juga mampu mendorong perubahan sesuai kebutuhan unit kerjanya	Meningkatkan peran seluruh agen perubahan di setiap unit kerja untuk tidak hanya bertugas mempromosikan perubahan di lingkungannya, namun juga mampu mendorong perubahan sesuai kebutuhan unit kerjanya dan membangun <i>social control</i> di antara rekan kerja dalam upaya penguatan integritas, serta mengoptimalkan monitoring dan evaluasi atas kinerja seluruh agen perubahan	B03, B06, B09, B12

3. Penerapan . . .

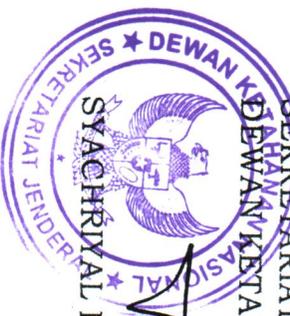
1	2	3	4	5	6
3.	Penerapan kebijakan sistem merit dan manajemen talenta di lingkungan Setjen Wantannas belum sepenuhnya dilakukan secara optimal	Ketua Program Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur	Mempercepat terlaksananya sistem merit dengan menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit Dalam Manajemen ASN	Mempercepat terlaksananya sistem merit dengan menerapkan seluruh ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Menteri PANRB Nomor 40 Tahun 2018 tentang Pedoman Sistem Merit dalam Manajemen ASN. Hal ini termasuk mengimplementasikan aturan tentang manajemen talenta sesuai Peraturan Menteri PANRB Nomor 3 Tahun 2020 tentang Manajemen Taleta ASN	B03, B06, B09, B12
4.	Telah melakukan upaya pembangunan Zona Integritas pada unit kerja di lingkungan Setjen Wantannas	Ketua Program Penguatan Pengawasan	Meningkatkan pembangunan Zona Integritas terutama pada unit kerja yang merupakan layanan utama	Upaya percepatan reformasi birokrasi dengan memperhatikan strategi yang sesuai dengan kebutuhan Setjen Wantannas dan stakeholders yang dilayani	B03, B06, B09, B12
5.	Belum maksimalnya integritas pegawai yang ditandai dengan tingkat kepatuhan terhadap pelaporan harta kekayaan (LHKPN) yang masih belum mencapai 100%		Meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN sebagai salah satu wujud transparansi dan penegakan integritas pegawai	Meningkatkan kepatuhan terhadap pelaporan LHKPN sebagai salah satu wujud transparansi dan penegakan integritas pegawai	B03, B06, B09, B12
6.	Survei kualitas pelayanan terhadap stakeholders dari Setjen Wantannas telah dilakukan satu kali dalam setahun	Ketua Program Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik	Mengoptimalkan kualitas pelaksanaan dan tindak lanjut hasil survei kepuasan stakeholders secara berkala	Mengoptimalkan kualitas pelaksanaan dan tindak lanjut hasil survei kepuasan stakeholders secara berkala agar mendapatkan umpan balik ( <i>feedback</i> ) peningkatan layanan yang sesuai dengan kebutuhan stakeholders.	B03, B06, B09, B12

Selanjutnya . . .

1	2	3	4	5	6
7.	Meningkatkan mutu <i>self-assessment</i> atas aspek – aspek pada hasil antara area perubahan	Ketua Pok Program A, B, C, D, E, F, G, dan H	Meningkatkan mutu <i>self-assessment</i> atas aspek – aspek pada hasil antara area perubahan	Selanjutnya, menyampaikan hasil survei tersebut kepada publik secara berkala Meningkatkan mutu <i>self-assessment</i> atas aspek – aspek pada hasil antara area perubahan, serta koordinasi dengan <i>leading sector</i> yang bersangkutan agar dapat meningkatkan hasil penilaian indeks – indeks hasil antara yang masih belum maksimal	B03, B06, B09, B12

DEPUTI SISTEM NASIONAL

SEKRETARIAT JENDERAL  
DEWAN KETAHANAN NASIONAL,



SYACHRIVAL E. S/REGAR